

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Merty Fatharani*, Luluk Fadliyanti*, Eka Agustiani*
*Universitas Mataram, Mataram

fadliyanti@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis PDRB, jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian ekplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2010-2019 diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji parsial t, uji simultan f dan uji koefisien determinasi (R²) dengan tingkat signifikansi 5%, dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa PDRB tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap belanja daerah, jumlah penduduk memiliki hubungan yang signifikan terhadap belanja daerah, dan inflasi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap belanja daerah. Secara simultan menunjukkan bahwa PDRB, jumlah penduduk dan inflasi memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Adapun nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 93,4% dipengaruhi oleh PDRB, jumlah penduduk dan inflasi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Berdasarkan uji kriteria ekonometrika pada penelitian ini tidak terdapat penyimpangan asumsi klasik.

Kata Kunci: Belanja Daerah, PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi.

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem perekonomian pendapatan atau penerimaan suatu daerah diperoleh melalui hak daerah tersebut untuk memungut pajak, melakukan pinjaman, kewajiban untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah daerah dan membayar tagihan. Pengeluaran dan penerimaan daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah Daerah yang sebelumnya telah dibahas dan disetujui oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU no 32 tahun 2004). Tujuan perancangan APBD adalah agar pemerintah Daerah dapat memperkirakan berapa jumlah besaran pendapatan yang akan diterima dan

besaran pengeluaran yang akan dibelanjakan. Terdapat tiga komponen APBD yaitu belanja daerah, pendapatan daerah dan pembiayaan daerah yang sangat mempengaruhi keberhasilan perekonomian suatu daerah. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. (Halim, 2019: 140).

Belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting. Hal itu disebabkan karena masyarakat pemberi dana publik (public fund) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah. Dalam organisasi menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam laporan realisasi.

Anggaran analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi, dan perbaikan ke depan. (Mahmudi, 2016:153). Bahkan, belanja pemerintah menjadi instrument penting dalam menstimulasi perekonomian daerah. Tidak seperti di perusahaan, dimana manajemen dituntut untuk menekan belanja/biaya serendah mungkin, di pemerintah daerah, kepala daerah justru diminta untuk membelanjakan dana yang mereka kelola sebaik mungkin sebab sebagian belanja tersebut juga dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Tabel 1. Belanja Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2019

Tahun	Anggaran Belanja Daerah (rupiah)	Realisasi Bbelanja Daerah (rupiah)	Presentase Realisasi Belanja Daerah (%)
2010	1.445.881.007.785,99	1.275.746.585.399,35	88,23
2011	1.750.336.724.066,00	1.650.601.274.586,27	94,30
2012	2.364.438.870.749,04	2.189.181.696.292,53	92,59
2013	2.586.039.126.500,00	2.374.904.157.964,81	91,84
2014	2.897.422.574.129,80	2.614.100.101.360,92	90,22
2015	3.620.067.730.000,00	3.364.903.670.000,00	92,95

Tahun	Anggaran Belanja Daerah (rupiah)	Realisasi Bbelanja Daerah (rupiah)	Presentase Realisasi Belanja Daerah (%)
2016	3.953.333.992.191,75	3.764.301.951.074,96	95,22
2017	5.546.406.104.616,00	5.255.577.630.390,00	94,76
2018	5.793.127.598.592,73	5.239.531.399.449,77	90,44
2019	6.077.645.971.342,00	5.148.158.519.514,76	84,70

Sumber : <https://ntb.bps.go.id>

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dikatakan bahwa Belanja daerah di Provinsi NTB terus meningkat dari tahun ke tahun artinya dari anggaran tersebut memaksimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah. Namun, pada tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dan jika dilihat dari realisasi anggaran belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah berbeda-beda, dapat dilihat dari presentase realisasi belanja daerah. Pada tahun 2010 sebanyak 88,23% dan untuk tahun berikutnya dari tahun 2011 hingga tahun 2018 sebanyak 90% ke atas. Namun jika diteliti lagi, presentase realisasi pada tahun 2016 dengan tahun 2017 memang di atas 90% namun jika dilihat dari perbedaan angka realisasi anggarannya sangat jauh jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari 3.764.301.951.074,96rupiah menjadi 5.255.577.630.390,00rupiah perbedaannya hingga 1 triliun, sedangkan tahun di atasnya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya miliar rupiah saja. Sehingga di tahun 2017 proporsi sangat meningkat. Untuk menilai apakah kenaikan tersebut masih dalam batas kewajaran atau tidak maka perlu dilihat berapa besarnya inflasi, berapa tambahan cakupan layanan, berapa pertumbuhan penduduk, belanja apa yang paling besar mempengaruhi kenaikan pertumbuhan tersebut, apa alasan kenaikan atas belanja itu, apakah kenaikan belanja di sebabkan karena faktor internal yang relative terencana atautkah faktor eksternal yang di luar kendali pemerintah daerah. (Mahmudi, 2016:160). Untuk meningkatkan belanja daerah, jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harus besar. Karena semakin besar PDRB, maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh kabupaten/kota, dengan semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh pemerintah pusat akan lebih besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal di daerah tersebut untuk kepentingan pelayanan publik. (Lin dan Lun 2000). Selain PDRB, faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap belanja daerah adalah jumlah penduduk. Pengeluaran Belanja daerah dilihat dari perkembangan Jumlah penduduk

di suatu daerah, apabila perkembangan jumlah penduduk semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar. Karena meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik, pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan. (Gorahe et al, 2013, dalam Afriana, 2016:) Kondisi keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya serta kemampuan dalam mengolah sumber-sumber keuangan daerah sangat mempengaruhi alokasi belanja daerah itu sendiri. Namun dengan adanya kenaikan harga BBM tentu saja berdampak pada inflasi dan secara otomatis akan mengubah harga satuan, karena standar satuan harga dipengaruhi oleh harga pasar. Sebagai akibat kenaikan harga barang dan jasa, maka nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin lemah. Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. (Kebangsentralan seri inflasi, 2009: 17).

Wuri (2019) meneliti tentang Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Indonesia Tahun 2010-2017. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara cross section dan time series variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, jumlah penduduk dan luas wilayah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah Provinsi di Indonesia.

Widyaswari (2018) meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah Di Kabupaten Cilacap Periode 2011-2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga variabel yang diuji, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap Alokasi Belanja Daerah. Dana Transfer (Dana Desa) dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Daerah.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat".

Rumusan Masalah

Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Inflasi berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010 – 2019

Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010 – 2019

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Inflasi secara parsial terhadap Belanja Daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010 – 2019.

2. KAJIAN PUSTAKA

Anggaran

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Rencana-rencana tersebut disusun secara matang yang nantinya dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu, maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara/daerah perlu dibuat rencana tersebut dan dituangkan dalam bentuk anggaran (Halim, 2019:138). Menurut M. Marsono dalam bukunya "Tata Usaha Pembendaharaan Republik Indonesia" memberikan definisi bahwa anggaran adalah suatu rencana pekerjaan yang pada suatu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara pada suatu masa depan, dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut.

Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/

kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kelender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa.

Penduduk

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi.

Inflasi

Inflasi yang tinggi akan menjadi beban bagi semua pihak. Dengan inflasi, maka daya beli suatu mata uang menjadi lebih rendah atau menurun. Dengan menurunnya daya beli mata uang, maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik barang maupun jasa akan semakin rendah. Laju inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan perencanaan bagi dunia usaha, tidak mendorong masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi, menghambat perencanaan pembangunan oleh pemerintah, merubah struktur APBN maupun APBD dan berbagai dampak negatif lain yang tidak kondusif bagi perekonomian secara keseluruhan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini nantinya akan dijelaskan bagaimana hubungan interaktif atau timbal balik antara variabel yang akan diteliti dan sejauh mana hubungan tersebut saling mempengaruhi.

Lokasi penelitian

Wilayah yang dijadikan penelitian adalah wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder (time series) dalam kurun waktu 2010-2019. Adapun data yang digunakan meliputi data Belanja Daerah (Y), Produk Domestik Regional Bruto (X1), Jumlah Penduduk (X2), Inflasi (X3). Sumber data berasal dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, dan jurnal.

Variabel Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

X1 = Produk Domestik Regional Bruto

X2 = Jumlah Penduduk

X3 = Inflasi

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah:

Y = Belanja Daerah

Metode Pengambilan dan Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang diolah instansi yang terkait dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan analisis regresi linear berganda, analisis regresi linear berganda adalah regresi yang terdiri atas lebih dari satu variabel independen.

model penelitian sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

Dimana:

Y = Belanja Daerah (rupiah)

β_0 = Intercept atau Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi Variabel PDRB

β_2 = Koefisien Regresi Variabel Jumlah Penduduk

β_3 = Koefisien Regresi Variabel Inflasi

X1 = Produk Domestik Regional Bruto (rupiah)

X2 = Penduduk (jiwa)

X3 = Inflasi (persen)

e_i = error term (kesalahan pengganggu)

Dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh PDRB, Jumlah penduduk, dan Inflasi terhadap Belanja Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat digunakan analisis Linear

Berganda dimana pengujian akan dilakukan dalam dua (2) tahap. Tahap yang pertama dengan melakukan pengujian statistik melalui uji parsial dan uji simultan, kemudian pada tahap kedua akan dilakukan uji kriteria ekonometrik.

Uji Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi di setiap variabel independen, dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

$H_0 : \beta_i = 0$ artinya variabel X1 atau X2 atau X3 tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Y.

$H_a : \beta_i \neq 0$ artinya variabel X1 atau X2 atau X3 mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Y.

b. Uji F (Simultan)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen, dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_n = 0$ artinya variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

$H_a : \text{tidak semua koefisien } \beta_n \neq 0$, artinya variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi R^2 (R-square)

Nilai R^2 atau (R^2 Squared) berkisar antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati satu (1) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Gujarati, 2003: 187).

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Pembahasan

Berikut ini adalah hasil estimasi regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefesien	Keterangan
Konstanta (C)	-29184948,027	Signifikan
PDRB (X1)	0,004	Tidak Signifikan
Jumlah Penduduk (X2)	6,733	Signifikan
Inflasi (X3)	-13671,962	Tidak Signifikan

Sumber: Data sekunder diolah (lampiran 5)

Berdasarkan tabel 2 di atas diperoleh hasil persamaan regresi berganda adalah $Y = -29184948,027 + 0,004X_1 + 6,733X_2 - 13671,961X_3$. Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Konstanta (β_0)

Jika nilai PDRB, jumlah penduduk dan inflasi atau variabel independen tetap atau tidak berubah atau sama dengan nol (0) maka nilai belanja daerah akan tetap sebesar -29184948,027 juta rupiah.

b) Koefisien Produk Domestik Regional Bruto (β_1)

Koefisien variabel PDRB memiliki nilai sebesar 0,004, dan arah hubungan regresi bertanda positif. Maknanya, jika PDRB mengalami peningkatan 1 satuan (Rp 1.000.000,-) dengan asumsi variabel lain *Ceteris Paribus*, maka nilai jumlah belanja daerah (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,004 juta rupiah.

c) Koefisien Jumlah Penduduk (β_2)

Koefisien variabel jumlah penduduk memiliki nilai sebesar 6,733 dan arah hubungan regresi bertanda positif. Maknanya, jika jumlah penduduk mengalami peningkatan 1 satuan (1 jiwa) dengan asumsi variabel lain *Ceteris Paribus*, maka akan meningkatkan nilai belanja daerah (Y) sebesar 6,733 juta rupiah.

d) Koefisien Inflasi (β_3)

Koefisien variabel inflasi memiliki nilai sebesar -13671,96, dan arah hubungan regresi bertanda negatif. Maknanya, jika tingkat inflasi mengalami peningkatan 1 satuan (1%) dengan asumsi variabel lain *Ceteris Paribus*, maka nilai jumlah belanja daerah (Y) mengalami penurunan sebesar 13671,96 juta rupiah.

Hasil Analisis dan Estimasi

a. Uji Statistik

Uji t (parsial)

Tabel 3. Hasil Estimasi Uji t dengan analisis regresi berganda

Variabel	t-hitung	Signifikansi
Konstanta (C)	-3,656	0,011
PDRB (X1)	0,133	0,899
Jumlah Penduduk (X2)	3,299	0,016
Inflasi (X3)	-0.153	0,884

Sumber: Data sekunder diolah (Lampiran 5)

kesimpulan dan interpretasi sebagai berikut:

b. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (X1) terhadap Belanja Daerah (Y)

Berdasarkan hasil nilai thitung pada Produk Domestik Regional Bruto (X1) lebih kecil dari ttabel ($0,133 < 2,447$) atau nilai signifikansi lebih dari 5% ($0,899 > 0,05$)

dengan demikian H_a ditolak dan H_0 diterima, maka Produk Domestik Regional Bruto tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.

c. Pengaruh Jumlah Penduduk (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y)

Berdasarkan nilai thitung pada Jumlah Penduduk (X_2) lebih besar dari ttabel ($3,299 > 2,447$) atau nilai signifikansi kurang dari 5% ($0,016 < 0,05$) dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak, maka Jumlah Penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah, artinya peningkatan Jumlah Penduduk akan meningkatkan Belanja Daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat.

d. Pengaruh Inflasi (X_3) terhadap Belanja Daerah (Y)

Berdasarkan hasil nilai -thitung pada Inflasi (X_3) lebih besar dari -ttabel ($-0,153 > -2,447$) atau nilai signifikansi lebih dari 5% ($0,884 > 0,05$) dengan demikian H_a ditolak dan H_0 diterima, maka Inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja

Daerah di daerah provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pembahasan

Berdasarkan hasil estimasi pada penelitian ini mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk dan inflasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linear berganda, secara parsial pada variabel Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Artinya dalam hal ini produk domestik regional bruto belum mampu meningkatkan belanja daerah secara signifikan di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2019.

b. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linier berganda, secara parsial pada variabel jumlah penduduk bernilai positif dan memiliki berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya Jumlah Penduduk maka akan meningkatkan Belanja Daerah. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk di provinsi Nusa Tenggara Barat yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan bertambahnya penduduk maka akan semakin banyak tuntutan yang diperlukan, apalagi dengan semakin

canggihnya dunia digital yang menuntut untuk mengikuti perkembangan sehingga menambah pengeluaran pemerintah untuk kepentingan publik.

c. Pengaruh Inflasi terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linear berganda, secara parsial pada variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya Inflasi maka Belanja Daerah menurun. Disebabkan oleh tingginya harga beli dan permintaan menurun dan menyebabkan belanja daerah menurun.

1) Uji F (Simultan)

Tabel 4. Hasil Uji F (Uji Simultan)

F-statistik	Signifikansi
28,530	0,001

Sumber: Data sekunder diolah (Lampiran 6)

Nilai Fhitung = 28,530 dengan nilai signifikansi = 0,001, berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh Fhitung > Ftabel (28,530 > 4,76) atau signifikansi < 5% (0,001 < 0,05). Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya bahwa secara bersama-sama variabel bebas (X) yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan (X1), jumlah Penduduk (X2) dan Inflasi (X3) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2019 dengan derajat kepercayaan 95%.

Semua variabel independen yaitu PDRB, jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2019.

Besarnya pengaruh dari semua variabel independen terlihat dari nilai koefisien determinan (R²).

2) Uji Koefisien Determinasi R² (R-Square)

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-Square
0,934

Sumber: Data sekunder diolah (Lampiran 7)

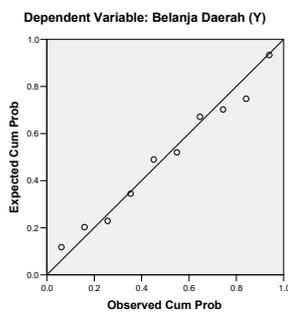
Berdasarkan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi R² (R-Square) sebesar 93,4%. Hal ini berarti menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen yang berada dalam model yaitu PDRB atas dasar harga konstan, jumlah penduduk dan inflasi mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 93,4% terhadap variabel dependen belanja daerah dan sisanya 6,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini.

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Gambar 1. Grafik Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data sekunder diolah

Dari gambar grafik di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, artinya data pada penelitian ini terdistribusi normal dan telah memenuhi uji normalitas.

2) Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

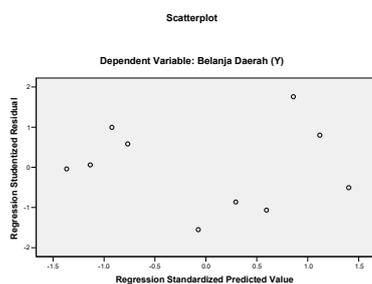
Variabel Independen	Tolerance	VIF
PDRB (X1)	0,148	6,765
Jumlah Penduduk (X2)	0,142	7,020
Inflasi (X3)	0,383	2,608

Sumber: Sumber data diolah (Lampiran 5)

Dari nilai Tolerance ketiga variabel independen lebih dari 0,100. Dan nilai VIF dari PDRB atas dasar harga konstan sebesar 6,765, jumlah penduduk sebesar 7,020 dan inflasi sebesar 2,608. Dari nilai VIF ketiga variabel independen kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antarvariabel bebas.

3) Heterokedastisitas

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data sekunder diolah

Dari gambar 4.4 di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam analisis penelitian tahun 2010-2019 di provinsi Nusa Tenggara Barat ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson adalah sebagai berikut:

- $DU < DW < 4-DU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.
- $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi.
- $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson
1,733

Nilai DW dari output diperoleh 1,733. Untuk nilai DL dan DU dapat dilihat di DW tabel pada signifikan 0,05 dengan n (jumlah data) = 10 dan k (jumlah variabel independen) = 3; diperoleh nilai DL adalah 0,5253 dan DU adalah 2,0163, jadi nilai $4-DU = 1,9837$ dan $4-DL = 3,4747$. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,679. Hal ini berarti nilai DW (1,679) berada pada daerah antara DL dan DU, maka tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti dalam hasil uji autokorelasi pada penelitian di tahun 2010-2019 di provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian regresi linear berganda Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2019. Sedangkan Jumlah Penduduk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2019. Selanjutnya Inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2019.
2. Berdasarkan hasil uji F bahwa variabel PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2019.

Saran

1. Pemerintah perlu mendorong untuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dengan menggali sumber-sumber PDRB serta pengembangan terhadap sektor unggulan agar pendapatan daerah menjadi semakin meningkat, serta penyediaan sarana pendidikan, pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya sehingga sehingga akan mempengaruhi kegiatan produksi barang atau jasa dan belanja daerah pun jadi bertambah untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah.
2. Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk menjaga kestabilan inflasi tetap ringan agar tidak terjadinya hiperinflasi dan tidak mengalami penurunan daya beli agar bisa meningkatkan perekonomian dan melancarkan pembangunan daerah.
3. Untuk penelitian selanjutnya perlu ditambahkan variabel-variabel lain yang menjadi faktor dari belanja daerah apabila menggunakan tema yang sama menambahkan data agar penelitian lebih menjadi maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2007, Akuntansi Sektor Publik: *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Keempat*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Ahmad, 2016. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah kabupaten/Kotadiprovinsi Jawa Barat tahun 2008-2013". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2010. *Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010*. Mataram: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2011. *Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011*. Mataram: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2012. *Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012*. Mataram: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013. *Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013*. Mataram: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2014. *Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014*. Mataram: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015. *Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015*. Mataram: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016. *Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016*. Mataram: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017. *Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017*. Mataram: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018. *Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018*. Mataram: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019. *Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019*. Mataram: Badan Pusat Statistik.
- Gregory, Mankiw, 2006. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, Damodar, 2003. *Ekonomitri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Kurnia, P. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Periode 2007-2015*. Karya Ilmiah.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Kedua*. Penerbit erlangga, Jakarta.
- Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 2008. *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Maryasari, Wuri, 2019. *Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Indonesia Tahun 2010-2017*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Mutiara, Imania, 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015*. Skripsi Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang.
- Ningrum, Widyaswari Kusuma, 2018. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah Di Kabupaten Cilacap Periode 2011-2015*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat: LKPD Provinsi NTB: <https://ppid.ntbprov.go.id/halaman-20-laporan-keuangan-provinsi-ntb.html>, diakses pada tanggal 26 Juli Tahun 2017.
- Suseno dan Siti Astiah, 2009. *Kebanksentralan Seri Inflasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Sugiyono.2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah
- Wulandari, Afriana, 2016. *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Dan Jumlah Penduduk, Terhadap Kebijakan Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2014*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yuwono, Sony, et al. 2008. *APBD dan Permasalahannya*. Malang: Bayumedia Publishing.